

PPID
(Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
Badan Pengelolaan Keuangan & Pendapatan Daerah
Provinsi Jambi

PENETAPAN STRATEGI DAN METODE

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING
PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI OLEH PPID PELAKSANA
PADA PEJABAT FUNGSIONAL BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI JAMBI

1.Strategi

a. Penguatan Kapasitas

- Melaksanakan bimbingan teknis, workshop, dan pelatihan terkait ketebukaan informasi publik.
- Penyusunan pedoman teknis layanan informasi yang mudah dipahami oleh pejabat fungsional.

b. Standarisasi Layanan Informasi

- Menetapkan SOP layanan informasi publik.
- Penggunaan aplikasi/sistem informasi terintegrasi untuk pengelolaan data dan dokumentasi.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

- Penerapan prinsip keterbukaan dalam setiap layanan informasi publik.
- Melibatkan mekanisme pelaporan berkala dari Pejabat Fungsional kepada PPID Pelaksana.

d. Kolaborasi dan Koordinasi

- Membangun sinergi antar-bidang/unit kerja dalam penyediaan informasi publik.
- Melibatkan Pejabat Fungsional dalam pengumpulan, verifikasi, dan penyajian informasi.

2. Metode Pembinaan

- **Sosialisasi Berkala:** Penyebarluasan aturan, regulasi, dan kebijakan terkait keterbukaan informasi.
- **Coaching & Mentoring:** Pendampingan langsung oleh PPID Utama/ Pejabat Struktural terhadap Pejabat Fungsional.
- **Pemberian Reward dan Punishment:** Apresiasi atas kinerja baik serta teguran bagi yang lalai menjalankan tugas.
- **Knowledge Sharing:** Forum diskusi internal untuk berbagi pengalaman dan solusi permasalahan layanan informasi.

3. Metode Pengawasan

- **Audit Internal Informasi:** Pemeriksaan kelengkapan, keakuratan, dan keterkinian data/informasi yang disajikan.
- **Pengawasan Berjenjang:** PPID Pelaksana mengawasi Pejabat Fungsional sesuai SOP dan melaporkan kepada PPID Utama.
- **Pengawasan Partisipatif:** Memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait kualitas layanan informasi.

4. Metode Evaluasi

- **Evaluasi Kinerja Berkala:** Dilakukan setiap triwulan melalui laporan capaian dan realisasi layanan informasi.
- **Survey Kepuasan Layanan:** Menilai kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi publik.
- **Review Dokumen dan Data:** Memastikan informasi yang disajikan dengan standar dan peraturan perundang-undangan.
- **Analisis Gap:** Mengidentifikasi kelemahan/kekurangan serta memberikan rekomendasi perbaikan.

5. Metode Monitoring

- **Pelaporan Rutin:** Pejabat Fungsional menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi ke PPID Pelaksana.
- **Dashboard Monitoring:** Pemanfaatan sistem/aplikasi untuk memantau real-time kinerja layanan informasi.
- **Monitoring Lapangan:** Kunjungan kerja langsung untuk memastikan standar layanan informasi dijalankan.
- **Rapat Koordinasi:** Dilaksanakan bulanan atau sesuai kebutuhan untuk membahas perkembangan dan kendala.

Output yang diharapkan:

- Tersedianya informasi publik yang **Lengkap, Akurat, Cepat, dan Dapat Diakses**.
- Terwujudnya **Akuntabilitas dan Transparansi** di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.
- Meningkatnya **Kinerja PPID Pelaksana dan Pejabat Fungsional** dalam mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik.

PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN MONITORING

PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK
OLEH PPID PELAKSANA PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAMBI

1.Strategi

Dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemahaman Pejabat Fungsional maupun pelaksana layanan informasi publik.

Bentuk kegiatan:

- Sosialisasi regulasi dan pedoman keterbukaan informasi publik.
- Bimbingan teknis dan workshop pengelolaan informasi publik.
- Pendampingan (coaching & mentoring) oleh PPID Utama kepada PPID Pelaksana.
- Knowledge sharing antar-unit kerja terkait penyediaan data dan informasi.

2. Pengawasan

Dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan layanan informasi publik sesuai standar dan ketentuan.

- Pengawasan berjenjang melalui mekanisme laporan dari Pejabat Fungsional ke PPID Pelaksana dan PPID Utama.
- Audit internal terkait kelengkapan, keakuratan, dan keterkinian informasi.
- Mekanisme pengawasan partisipatif dengan menerima pengaduan atau masukan masyarakat.

3. Evaluasi

Dilaksanakan untuk menilai kualitas layanan informasi dan efektivitas kebijakan.

Bentuk kegiatan:

- Evaluasi kinerja layanan informasi secara berkala (triwulan/semester/tahunan).
- Review terhadap dokumen, data, dan laporan informasi yang dipublikasikan.
- Survei kepuasan masyarakat atas layanan informasi.
- Analisis capaian indikator kinerja PPID Pelaksana terkait layanan publik.

4. Monitoring

Dilaksanakan untuk memantau secara terus-menerus implementasi kebijakan informasi publik.

Bentuk kegiatan:

- laporan rutin pelaksanaan layanan informasi publik dari PPID Pelaksana.
- Pemanfaatan aplikasi/dashboard untuk memantau real-time data dan layanan informasi.
- Monitoring lapangan melalui kunjungan kerja dan observasi langsung.
- Rapat koordinasi berkala untuk membahas hasil monitoring, kendala, serta tindak lanjut perbaikan.

Tujuan:

- Menjamin **Transparansi, Akuntabilitas, dan Kualitas** layanan informasi publik.
- Memastikan PPID Pelaksana **konsisten menjalankan kebijakan keterbukaan informasi** sesuai peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan informasi publik di BPKPD.